

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN  
DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN  
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TESIS**



**KARIN YUDHA NINGRUM**

**NIM. B2091222007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**2024**

## **PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Karin Yudha Ningrum  
Nim : B2091222007  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Tesis : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir)

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 14 November 2024



Karin Yudha Ningrum  
NIM. B2091222007

## **PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Karin Yudha Ningrum  
Nim : B2091222007  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Tesis : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir)

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 14 November 2024

Karin Yudha Ningrum  
NIM. B2091222007

### **PERTANGGUNGJAWABAN TESIS**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karin Yudha Ningrum  
Nim : B2091222007  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Tesis :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 14 November 2024



Karin Yudha Ningrum

Nim. B2091222007

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karin Yudha Ningrum  
Nim : B2091222007  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Tesis :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 14 November 2024

Karin Yudha Ningrum

Nim. B2091222007

## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini berjudul :

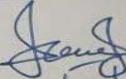
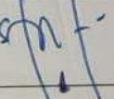
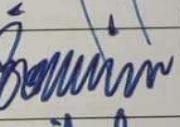
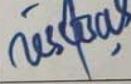
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Ini diajukan oleh :

Nama : KARIN YUDHA NINGRUM  
Nim : B2091222007  
Jurusan : AKUNTANSI  
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Tanggal Ujian : 14 NOVEMBER 2024

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam ujian Tesis dan Komprehensif untuk memenuhi Gelar Magister.

## MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing I	Umiaty Hamzani, SE, M.Com, Ph.D NIP. 19801218 200312 2 001	29/11/2024	
Pembimbing II	Sari Rusmita, SE, MM NIP. 19810916 200604 2 001	29/11/2024	
Penguji I	Dr. H. Syarbini Ikhsan, MM, CPA, CPI NIP. 19651220 199402 1 001	28/11/2024	
Penguji II	Helisa Noviarty, SE, MM NIP. 19751118 200212 2 001	25/11/2024	

Pontianak, 29 November 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi



Elok Heniwati, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA  
NIP. 19740212 200012 2 001

## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini berjudul :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Ini diajukan oleh :

Nama	:	KARIN YUDHA NINGRUM
Nim	:	B2091222007
Jurusan	:	AKUNTANSI
Program Studi	:	MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi	:	AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Tanggal Ujian	:	14 NOVEMBER 2024

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam ujian Tesis dan Komprehensif untuk memenuhi Gelar Magister.

### MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing I	Umiaty Hamzani, SE, M.Com, Ph.D NIP. 19801218 200312 2 001		
Pembimbing II	Sari Rusmita, SE, MM NIP. 19810916 200604 2 001		
Penguji I	Dr. H. Syarbini Ikhsan, MM, CPA, CPI NIP. 19651220 199402 1 001		
Penguji II	Helisa Noviarty, SE, MM NIP. 19751118 200212 2 001		

Pontianak, November 2024  
Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Elok Heniwati, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA**  
**NIP. 19740212 200012 2 001**

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”**.

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna menyelesaikan pendidikan S-2 pada program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penulisan tesis ini tidak sedikit bantuan yang diperoleh penulis dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak, CA, CMA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Elok Heniwati, S.E., M.Si, Ak, Ph.D, CA selaku Ketua Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Bapak Syarif M. Helmi, S.E., M.Ak, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Umiaty Hamzani, S.E., M.Com, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, semangat, doa, dan motivasi dalam tesis ini sehingga saya bisa menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu.
7. Ibu Sari Rusmita, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, semangat, doa, dan motivasi

dalam tesis ini sehingga saya bisa menyelesaiakannya dengan baik dan tepat waktu.

8. Bapak Dr. H. Syarbini Ikhsan, MM, CPA, CPI selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan waktu, saran perbaikan yang konstruktif, semangat, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini, sehingga tesis ini dapat berguna bagi orang lain.
9. Ibu Helisa Noviarty, S.E., M.M. selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan waktu, saran perbaikan yang konstruktif, semangat, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini, sehingga tesis ini dapat berguna bagi orang lain.
10. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan serta semua Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tanjungpura yang telah memberikan arahan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga pada penyelesaian tesis ini.
11. Teruntuk keluarga tercinta : Papa (Ir. Wahyu Widodo, M.T.), Mama (Dra. Sri Pamuji), Mas (Alvin Yudha Perkasa, A.P.) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis dengan baik dan lancar, serta teruntuk almarhum Adik (Arya Yudha Trisan).
12. Teman-teman Kelas Malam dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang telah memberikan motivasi dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mohon maaf serta menyadari adanya kelemahan dan kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak guna kesempurnaan tesis ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta pengembangan penelitian mengenai keuangan sektor publik mendatang.

Pontianak, 14 November 2024

Karin Yudha Ningrum

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan setiap Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang diunduh dari situs Badan Pusat Statistik dengan menggunakan teknik dokumentasi sebagai pengumpulan data dan sampling jenuh sebagai kriteria pengambilan sampel. Populasi penelitian ini sebanyak 14 Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat yang terdaftar di Badan Pusat Statistik dengan periode analisis dari tahun 2020-2023. Pada penelitian ini menggunakan program *software Econometric Views* (Eviews) versi 13 sebagai teknik analisis data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dana perimbangan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Belanja modal tidak memediasi hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.**

## ***ABSTRACT***

*This study aims to test and analyze the effect of local revenue and balancing funds on the level of regional financial independence with capital expenditure as the mediating variable in West Kalimantan Provincial Government. The method used in this study is quantitative. The data source for this study is secondary data in the form of financial reports of each City/Regency Government in West Kalimantan Province downloaded from the Central Statistics Agency website using documentation techniques as data collection and saturated sampling as sampling criteria. The population of this study was 14 Cities/Regencies of West Kalimantan Province registered with the Central Statistics Agency with an analysis period of 2020-2023. This study used the Econometric Views (Eviews) software program version 13 as a data analysis technique. The test results show that local revenue has a significant positive relationship with the level of financial independence of the West Kalimantan Provincial Government. Balancing funds have a significant negative relationship with the level of financial independence of the West Kalimantan Provincial Government. Capital expenditure does not mediate the relationship between local revenue and balancing funds on the level of financial independence of the West Kalimantan Provincial Government. Capital expenditure does not have a significant effect on the level of financial independence of the West Kalimantan Provincial Government.*

**Keywords:** *Regional Original Income, Balancing Funds, Capital Expenditure, Level of Regional Financial Independence.*

**RINGKASAN TESIS**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

**1. Latar Belakang**

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal setiap tahunnya yang mengakibatkan lemahnya juga perhatian dalam menggali potensi daerah yang dimilikinya, yaitu pendapatan asli daerah yang hanya dapat menyumbang lebih sedikit untuk membiayai alokasi belanja modal tersebut (Novitasari & Novitasari, 2019; Saraswati & Nurharjanti, 2021). Kontribusi pendapatan asli daerah yang cenderung lebih sedikit menjadi permasalahan karena antar daerah memiliki pendapatannya yang juga bervariasi mengakibatkan hanya mampu membiayai pengeluaran alokasi belanja modal sangat minim (Muradi, 2024; Nurvaliza & Putra, 2024).

Pemerintah daerah menerima sumber anggaran lain yang berasal dari pusat yaitu dana perimbangan yang selanjutnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Saputra et al., 2022). Semua Kabupaten dan Kota antar daerah berhak menerima dana perimbangan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, dimana dana perimbangan tersebut diserahkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah (Arpani & Halmawati, 2020). Dana perimbangan yang tinggi dapat menghambat peningkatan pengoptimalan pendapatan asli daerah yang mengakibatkan kemungkinan adanya kendala dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Ginting et al., 2019).

Kemandirian keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih berada pada tingkat konsultatif atau rendah meskipun mengalami peningkatan tetapi masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan seperti pada tahun 2020 sebesar 16,19%; tahun 2021 sebesar 21,08%; tahun 2022 sebesar 28,97% (DJPb, 2020, 2021, 2022). Terdapat alasan mengapa tingkat kemandirian keuangan suatu daerah bisa menurun adalah karena daerah tersebut belum sepenuhnya berhasil mengenali

potensi sumber pendapatannya karena pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerahnya, yaitu pendapatan asli daerah (Haryanto, 2019; Zulfikar, 2021). Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, untuk menguji peran belanja modal dalam memediasi hubungan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, untuk menguji peran belanja modal dalam memediasi hubungan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## **2. Metode Penelitian**

Bentuk penelitian ini merupakan kuantitatif dengan tempat dan waktu yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan tahun 2020-2023. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan APBD yang dikumpulkan melalui laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus atau sampling jenuh serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software Econometric Views* (Eviews) versi 13.

## **3. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya, dana perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara, pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak dimediasi oleh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Serta, belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## **4. Kesimpulan, Rekomendasi, dan Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan, artinya peningkatan pada pendapatan asli daerah mampu meningkatkan tercapainya tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara, dana perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan artinya realisasi dana perimbangan dari pusat lebih tinggi sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan. Selain itu, pendapatan asli daerah tidak dapat dimediasi oleh belanja modal untuk tingkat kemandirian keuangan daerah karena belanja modal tidak langsung dikelola pemerintah daerah akibat penyerapan anggaran yang lemah dan pemborosan pengeluaran belanja modal diluar dari kebutuhan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, dana perimbangan tidak dapat dimediasi oleh belanja modal untuk tingkat kemandirian keuangan daerah karena pemerintah daerah masih cenderung lemah dalam mengoptimalkan dana perimbangan untuk pelayanan publik sehingga lebih mengutamakan direalisasikan pada kebutuhan daerah lainnya. Serta, belanja modal tidak berpengaruh signifikan, artinya pengeluaran belanja modal tidak selalu terkait dengan tingkat kemandirian keuangan daerah karena terjadinya pemborosan pengeluaran sehingga tidak mampu membantu peningkatan pada pendapatan asli daerah, melainkan pemerintah daerah cenderung bergantung pada dana perimbangan dari pusat.

Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah tahun data sekunder penelitian, melakukan penelitian diluar Provinsi Kalimantan Barat, mengembangkan variabel independen dan dependen diluar penelitian ini seperti sisa lebih perhitungan anggaran atau *budget ratcheting*. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan serta menggali potensi pendapatan asli daerah serta meminimalisir terjadinya pemborosan belanja modal diluar peningkatan kualitas pelayanan publik dan memiliki kemampuan meminimalisir terjadinya ketergantungan pada dana perimbangan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT.....</b>	<b>i</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b><i>ABSTRACT.....</i></b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN TESIS .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	7
1.2.1    Pernyataan Masalah.....	7
1.2.2    Pertanyaan Penelitian.....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Kontribusi Penelitian .....	8
1.4.1    Kontribusi Teoritis .....	8
1.4.2    Kontribusi Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1    Landasan Teori .....	9
2.1.1    Teori Pengelolaan ( <i>Stewardship Theory</i> ).....	9
2.1.2    Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	11
2.1.3    Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2.1.4    Dana Perimbangan .....	13
2.1.5    Belanja Modal.....	15
2.1.6    Keuangan Daerah.....	16
2.2    Kajian Empiris.....	19
2.3    Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian .....	36

2.3.1	Kerangka Konseptual.....	36
2.3.2	Hipotesis Penelitian .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>42</b>
3.1	Bentuk Penelitian.....	42
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.4	Populasi dan Sampel.....	42
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel .....	43
3.5.1	Variabel Penelitian .....	43
3.5.2	Definisi Operasional Variabel .....	44
3.6	Teknik Analisis Data .....	48
3.6.1	Ragam Bentuk Model Panel Data .....	49
3.6.2	Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	51
3.6.3	Pengujian Asumsi Klasik .....	52
3.6.4	Uji Hipotesis Penelitian .....	53
3.6.5	Analisis Jalur .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>57</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	58
4.1.1	Pengujian Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	59
4.1.2	Pengujian Asumsi Klasik .....	63
4.1.3	Uji Hipotesis Penelitian.....	65
4.1.4	Uji Analisis Jalur .....	71
4.2	Pembahasan.....	72
4.2.1	Hubungan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah .....	72
4.2.2	Hubungan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.....	74
4.2.3	Hubungan pendapatan asli daerah dimediasi belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah .....	75
4.2.4	Hubungan dana perimbangan dimediasi belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah .....	78
4.2.5	Hubungan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.....	80

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Rekomendasi .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .....	45
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	47
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow Sub Struktural Pertama .....	60
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow Sub Struktural Kedua.....	60
Tabel 4.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test) Sub Struktural Pertama .....	61
Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test) Sub Struktural Kedua .....	62
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas Sub Struktural Pertama .....	63
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas Sub Struktural Kedua .....	64
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas Sub Struktural Pertama.....	64
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas Sub Struktural Kedua .....	65
Tabel 4.9 Uji Hipotesis Sub Struktural Pertama.....	66

Tabel 4.10 Uji Hipotesis Sub Struktural Kedua ..... 68

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023 ..... 2

Gambar 1.2 Data Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023 ..... 3

Gambar 1.3 Data Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023 ..... 4

Gambar 4.1 Susunan Hasil Pengujian Penelitian ..... 59

Gambar 2.3.1 Kerangka Konseptual Penelitian ..... 36

Gambar 3.6.1 Teknik Analisis Data ..... 49

Gambar 3.6.2 Analisis Jalur ..... 54

Gambar 4.1.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Belanja Modal ..... 71

Gambar 4.1.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Belanja Modal ..... 71

## **BAB I**

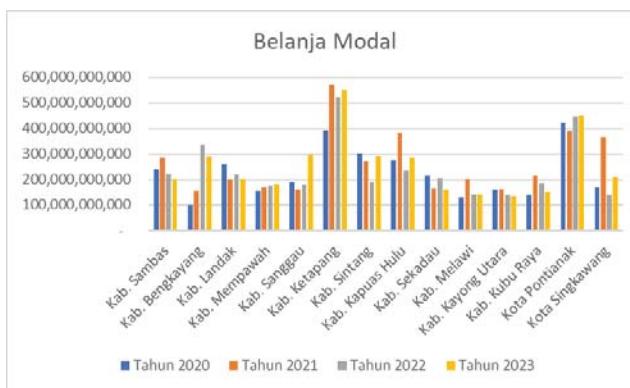
### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah mengarahkan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pratiwi et al., 2023). Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas bertujuan memastikan potensi daerah telah dikelola dengan baik (Saleh, 2020). Pengelolaan keuangan daerah yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah yang responsif mengenai aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya (Prastiwi & Aji, 2020). Masyarakat juga mempunyai hak dalam memantau pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya tersebut (Riyadi, 2022). Pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (Handayani & Erinos, 2020). Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam satu periode anggaran (Imamah et al., 2021). Anggaran pendapatan dan belanja daerah memuat rencana keuangan dari wilayah Provinsi, Kota, dan Kabupaten (Padang & Padang, 2023). Anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi dua komponen utama yaitu pendapatan dan belanja daerah (Arifah & Haryanto, 2019).

Salah satu jenis pengeluaran yang tertuang dalam belanja daerah adalah belanja modal (Wawo & Sulistyowati, 2022). Belanja modal diupayakan oleh pemerintah daerah untuk direalisasikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat daerahnya (Salim, 2019). Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara mengutamakan sumber anggaran daerah yang tersedia dialokasikan pada belanja modal sebagai prioritasnya (Priatna & Purwadinata, 2019). Mengingat proporsi sumber anggaran belanja modal daerah yang tersedia masih cukup terbatas, karena tergantung jumlah alokasi belanja modal yang dikelola pemerintah daerah untuk pelayanan publik bagi daerahnya (Malau et al., 2020; Silviani & Adiputra, 2023). Implementasi alokasi belanja modal bervariasi antar daerah disebabkan oleh perbedaan jumlah anggaran yang dilihat dari kebutuhan dan prioritas antar daerah

yang tergantung wewenang masing-masing pemerintah daerahnya sendiri (Oktavia & Handayani, 2021). Pemerintah daerah termotivasi untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat daerahnya melalui belanja modal setiap tahunnya sebesar 1% dengan berupaya mengelola sumber anggaran yang tersedia secara optimal (Sulistyawati & Purwanti, 2021). Berikut merupakan data belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat :



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2024

**Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023**

Pada gambar 1.1 di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan realisasi belanja modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat tidak stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi belanja modal tertinggi berada di Kota Pontianak dan terendah berada di Kabupaten Bengkayang (BPS, 2020). Pada tahun 2021, realisasi belanja modal tertinggi berada di Kabupaten Ketapang dan terendah berada di Kabupaten Bengkayang (BPS, 2021). Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi belanja modal tertinggi berada di Kabupaten Ketapang dan terendah berada di Kabupaten Kayong Utara (BPS, 2022, 2023).

Salah satu sumber anggaran yang membiayai realisasi pengeluaran belanja modal diperlukan pendapatan yang berasal dari wilayah daerahnya sendiri, yaitu pendapatan asli daerah (Hadi & Kusuma, 2023). Pendapatan asli daerah atau PAD berasal dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut yang memiliki peranan penting dalam mendukung alokasi belanja modal (Nauw & Riharjo, 2021). Pemerintah daerah mengalokasikan belanja

modal setiap tahunnya yang mengakibatkan lemahnya juga perhatian dalam menggali potensi daerah yang dimilikinya, yaitu pendapatan asli daerah yang hanya dapat menyumbang lebih sedikit untuk membiayai alokasi belanja modal tersebut (Novitasari & Novitasari, 2019; Saraswati & Nurharjanti, 2021). Kontribusi pendapatan asli daerah yang cenderung lebih sedikit menjadi permasalahan karena antar daerah memiliki pendapatannya yang juga bervariasi mengakibatkan hanya mampu membiayai pengeluaran alokasi belanja modal sangat minim (Muradi, 2024; Nurvaliza & Putra, 2024). Pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai alokasi belanja modal secara optimal, jika itu terjadi maka dapat dikatakan telah berhasil dalam menggali potensi daerahnya tersebut (Bilqis & Priyono, 2023; Tama & Pujiastuti, 2021). Berikut merupakan data pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat :

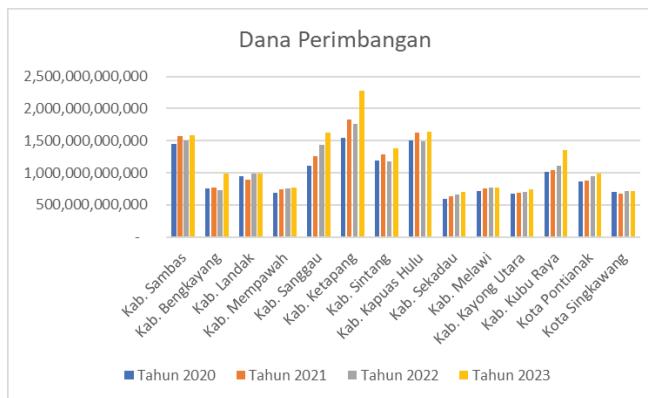


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2024

**Gambar 1.3 Data Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023**

Pada gambar 1.2 di atas setiap Kabupaten/Kota ini mengalami perbedaan pertumbuhan pendapatan asli daerahnya selama tahun 2020-2023. Pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2020 berada di Kota Pontianak dan terendah berada di Kabupaten Bengkayang (BPS, 2020). Pada tahun 2021, 2022, dan 2023 realisasi pendapatan asli daerah tertinggi berada di Kota Pontianak dan terendah berada di Kabupaten Kayong Utara (BPS, 2021, 2022, 2023).

Pemerintah daerah menerima sumber anggaran lain yang berasal dari pusat yaitu dana perimbangan yang selanjutnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Saputra et al., 2022). Semua Kabupaten dan Kota antar daerah berhak menerima dana perimbangan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, dimana dana perimbangan tersebut diserahkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah (Arpani & Halmawati, 2020). Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang relatif rendah menerima jumlah alokasi dana perimbangan lebih besar dengan harapan agar mampu menutupi pembiayaan belanja modal (Yustriawan, 2021). Pemerintah daerah bergantung terhadap dana perimbangan masih tinggi sekitar 70%-80% yang mengakibatkan pengoptimalan pendapatan asli daerahnya cenderung pasif (Arpani & Halmawati, 2020; Nugraha, 2019). Berikut merupakan data dana perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat :



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2024

**Gambar 1.5 Data Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023**

Pada gambar 1.3 di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan dana perimbangan tertinggi pada tahun 2020-2023 berada di Kabupaten Ketapang dan terendah berada di Kabupaten Sekadau, selain dua Kabupaten ini pada Kabupaten dan Kota lainnya juga cenderung mengalami peningkatan (BPS, 2020, 2021, 2022, 2023). Dana perimbangan yang tinggi dapat menghambat peningkatan pengoptimalan pendapatan asli daerah yang mengakibatkan kemungkinan adanya kendala dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Ginting et al., 2019).

Kemandirian keuangan daerah dapat dinilai dari pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang baik dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya (Sukmaji & Rohman, 2019). Kemandirian keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih berada pada tingkat konsultatif atau rendah meskipun mengalami peningkatan tetapi masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan seperti pada tahun 2020 sebesar 16,19%; tahun 2021 sebesar 21,08%; tahun 2022 sebesar 28,97% (DJPb, 2020, 2021, 2022).

Kemandirian pada keuangan daerah dapat ditentukan dari seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah dalam merealisasikan dana perimbangan ke daerahnya (Mahardika & Fauzan, 2022). Apabila ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan meningkat maka kemampuan keuangan daerah untuk menentukan tingkat kemandiriannya berada dikategori masih rendah atau konsultatif (Rivandi & Anggraini, 2022). Terdapat alasan mengapa tingkat kemandirian keuangan suatu daerah bisa menurun adalah karena daerah tersebut belum sepenuhnya berhasil mengenali potensi sumber pendapatannya karena pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerahnya, yaitu pendapatan asli daerah (Haryanto, 2019; Zulfikar, 2021). Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui rasio yang sudah ditetapkan karena rasio kemandirian menjelaskan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya (Angelina et al., 2020). Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan meminimalisir bergantungnya terhadap dana perimbangan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tercapainya kemandirian keuangan daerahnya (Indriani et al., 2023; Malau & Parapat, 2020).

Beragam penelitian terdahulu oleh (Arifah & Haryanto, 2019; Hadi & Kusuma, 2023; Imamah et al., 2021; Malau & Parapat, 2020; Pratiwi et al., 2023; Priatna & Purwadinata, 2019; Salim, 2019; Silviani & Adiputra, 2023; Sukmaji & Rohman, 2019; Sulistyawati & Purwanti, 2021; Wawo & Sulistyowati, 2022;

Yustriawan, 2021) menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan pengaruhi belanja modal secara signifikan positif. Penelitian oleh (Hadi & Kusuma, 2023; Pratiwi et al., 2023; Saputra et al., 2022) menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak pengaruhi belanja modal.

Beragam penelitian terdahulu oleh (Angelina et al., 2020; Nurvaliza & Putra, 2024; Riyadi, 2022) menunjukkan pendapatan asli daerah dan belanja modal mempengaruhi positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh (Bilqis & Priyono, 2023; Malau & Parapat, 2020; Novitasari & Novitasari, 2019; Oktavia & Handayani, 2021; Rivandi & Anggraini, 2022; Tama & Pujihastuti, 2021) menunjukkan pendapatan asli daerah pengaruhi signifikan positif dan belanja modal pengaruhi signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh (Handayani & Erinos, 2020; Haryanto, 2019; Indriani et al., 2023; Mahardika & Fauzan, 2022; Padang & Padang, 2023) menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan pengaruhi signifikan positif tapi belanja modal tidak pengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh (Nauw & Riharjo, 2021) menunjukkan pendapatan asli daerah pengaruh signifikan positif, dana perimbangan tidak pengaruh, dan belanja modal pengaruh signifikan negatif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh (Prastiwi & Aji, 2020; Saleh, 2020) menunjukkan pendapatan asli daerah pengaruh signifikan positif, dana perimbangan pengaruh signifikan negatif, dan belanja modal tidak pengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Dan, penelitian oleh (Ginting et al., 2019; Saraswati & Nurharjanti, 2021) menunjukkan dana perimbangan dan belanja modal tidak pengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Mengacu pada (Arpani & Halmawati, 2020) menggunakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebagai independen serta kemandirian sebagai dependen, dengan belanja modal sebagai mediasinya.

Adapun penelitian ini menggunakan objek dan periode penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu semua Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023. Dalam uraian latar belakang permasalahan pada penelitian diatas maka peneliti tertarik mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pernyataan Masalah**

Adanya uraian latar belakang yang telah dinyatakan diatas menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pelayanan publik untuk masyarakat melalui belanja modal menunjukkan sumber anggaran berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Pratiwi et al., 2023). Dominan dalam menggunakan dana perimbangan diartikan daerah belum siap mencapai mandiri, karena pendapatan asli daerahnya masih belum optimal dalam pengelolaannya (Haryanto, 2019). Pendapatan asli daerah memiliki peranan penting dalam menciptakan kemandirian daerahnya tersebut (Nauw & Riharjo, 2021). Kemandirian keuangan daerah diindikasikan menurun apabila kapasitas pendapatan asli daerah yang rendah dan dana perimbangan yang meningkat (Arpani & Halmawati, 2020). Daerah dikatakan mandiri apabila dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan baik dan tidak bergantung pada dana perimbangan guna pemenuhan belanja modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Sukmaji & Rohman, 2019). Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah diperlukan upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi alokasi belanja modal yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan daerah yang mandiri.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pernyataan masalah pada penelitian di atas terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?
2. Apakah dana perimbangan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?

3. Apakah pendapatan asli daerah dimediasi belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?
4. Apakah dana perimbangan dimediasi belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?
5. Apakah belanja modal pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Untuk menguji peran belanja modal dalam memediasi hubungan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
4. Untuk menguji peran belanja modal dalam memediasi hubungan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

#### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperoleh referensi, pengetahuan, dan informasi kepustakaan dalam mendukung pengembangan penelitian yang dilakukan selanjutnya dibidang keuangan sektor publik.

#### **1.4.2 Kontribusi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemangku kepentingan daerah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat) dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan belanja modal guna mencapai kemandirian keuangan daerah dengan meminimalisir penggunaan dana perimbangan.